

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi

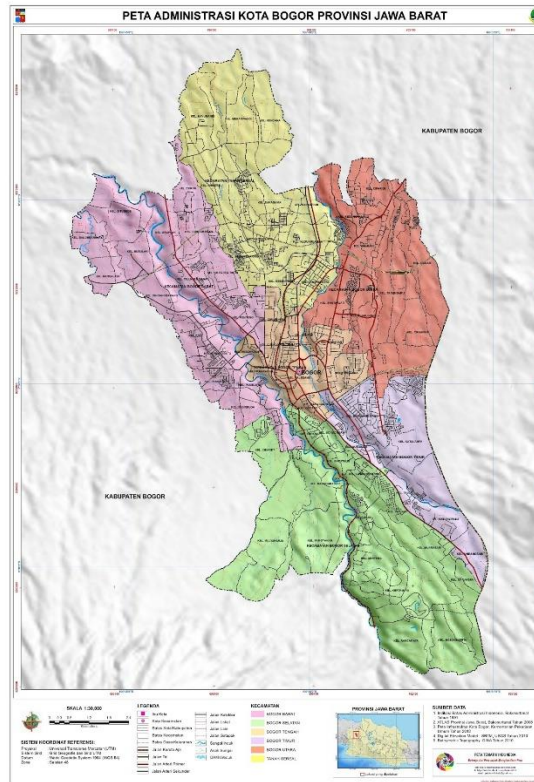
4.1.1 Profil Kota Bogor

Kota Bogor adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara yaitu DKI Jakarta, hal tersebut merupakan sebuah potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industry, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Kota Bogor memiliki rata-rata ketinggian minimum 190 meter dan maksimum 330 meter dari permukaan laut.

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Secara administrative, Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa, 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Kec. Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor
- Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi Kabupaten Bogor
- Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas Kabupaten Bogor
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin Kabupaten Bogor

Gambar 4. 1 Peta Kota Bogor



Sumber: [Pemerintah Kota Bogor](#), 2022

Kota Bogor memiliki luas wilayah 111,3858 km², Kecamatan Bogor Barat menempati urutan pertama dengan luas wilayah terbesar yaitu 3.285 Ha, sedangkan Kecamatan Bogor Tengah menempati posisi urutan ke enam dengan luas wilayah paling kecil, yaitu sebesar 813 Ha. Keterangan luas wilayah lebih rinci dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)
1.	Bogor Barat	23,3155
2.	Bogor Selatan	30,5021
3.	Tanah Sareal	20,6001
4.	Bogor Utara	18,1374

5.	Bogor Timur	10,464
6.	Bogor Tengah	8,3667
Kota Bogor		111,3858

Sumber : Pemerintah Kota Bogor

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor

Visi Pemerintah Kota Bogor adalah “**Mewujudkan Kota Bogor sebagai kota yang ramah keluarga**”. Adapun visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut :

Kota Bogor, meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu Kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

Kota yang ramah keluarga, dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Kondisi ramah keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik
- b. Kondisi ramah keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sector ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya
- c. Kondisi ramah keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata Kelola pemerintahan yang berkompeten.

Untuk perwujudan Visi tersebut akan dicapai melalui beberapa Misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor yang sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih, nyaman dan aman.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor yang cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digantikan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor yang sejahtera adalah suatu kondisi Kota di mana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan Makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya, semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat, ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera

sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

4.1.3 Aspek Demografi

Penduduk Kota Bogor pada tahun 2022 berdasarkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor sebanyak 1.114.018 jiwa yang terdiri atas 563.033 jiwa penduduk laki-laki dan 550.985 jiwa penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 2,07 persen.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Per-Kecamatan di Kota Bogor 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1.	Bogor Barat	23,3155	252.433	10.826,83
2.	Bogor Selatan	30,5021	216.501	7.097,90
3.	Tanah Sareal	20,6001	227.341	11.035,92
4.	Bogor Utara	18,1374	200.200	11.037,97
5.	Bogor Timur	10,464	108.212	10.341,90
6.	Bogor Tengah	8,3667	109.331	13.067,40
Kota Bogor		111,3858	1.114.018	10.001,44

Sumber : BPS Kota Bogor, Kota Bogor Dalam Angka 2023

Dari enam kecamatan, Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah penduduk terbesar yakni 252.433 jiwa (22,66%) dan terkecil adalah Kecamatan Bogor Timur tercatat sebesar 108.212 jiwa (9,71 %). Kepadatan Penduduk pada enam kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Bogor Tengah dengan kepadatan sebesar 13.067,40 jiwa/km², disusul kecamatan Bogor Utara sebesar 11.037,97 jiwa/km², sementara kecamatan Bogor Timur adalah kecamatan yang kepadatannya paling rendah yakni tercatat sebesar 10.341,36 jiwa/km².

4.1.4 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Bogor

Pembentukan Dinas Pendidikan Kota Bogor ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi pemerintah di bidang pendidikan yang menjadi urusan rumah tangga daerah.

Dalam melaksanakan tugas yaitu membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kota Bogor mempunyai fungsi yang diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 155 Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan
- d. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Bogor didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai yang bertugas menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing dengan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 4 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Sekolah Dasar membawahkan:

1. Seksi Kurikulum SD
2. Seksi Kesiswaan SD
- d. Bidang Sekolah Menengah Pertama membawahkan;
 1. Seksi Kurikulum SMP
 2. Seksi Kesiswaan SMP
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum PAUD Dikmas
 2. Seksi Kesiswaan PAUD Dikmas
- f. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan
 1. Seksi Sarana dan Prasarana SMP
 2. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Adapun visi dan misi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor antara lain :

VISI “Terwujudnya masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan prima”

MISI

- Meningkatkan kapasitas layanan pendidikan
- Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan
- Meningkatkan daya saing pada semua jenjang pendidikan
- Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Di Kota Bogor” dilaksanakan pada Lembaga PAUD di Kota Bogor. Informan penelitian berjumlah 16 orang. Selain menjangring data pada Lembaga PAUD mengenai pelaksanaan kebijakan PAUD HI, peneliti juga mengadakan wawancara kepada pihak pengelola kebijakan yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kepala PAUD dan

Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, serta SDM Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor. Hasil wawancara kepada Lembaga PAUD menjadi data penting dalam membandingkan serta mempertemukan hasil wawancara bersama pengelola kebijakan, juga hasil dokumentasi dan observasi secara langsung pada penelitian.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan kebijakan, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan pada pelaksanaannya. Jika sebuah kebijakan sudah diambil secara tepat, tetapi tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi kegagalan jika dalam proses dari implementasinya tidak dilakukan secara baik dan optimal. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Bogor yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Di Kota Bogor akan diketahui pelaksanaannya sudah berlangsung secara baik atau tidak dengan disajikan melalui teori implementasi kebijakan. Menurut Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

4.2.1 Komunikasi

Menurut Edward III dalam variable komunikasi menunjukkan peranan penting bahwa komunikasi sebagai acuan agar pelaksana mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan kebijakan. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tidak terlepas dari adanya komunikasi antara pihak implementor tingkat kabupaten/kota dan masyarakat. Komunikasi merupakan penyampaian

informasi dari komunikator satu kepada komunikator lainnya. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila komunikasi yang disampaikan tidak jelas sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Maka dari itu, keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan memerlukan komunikasi yang baik dengan harapan pelaksanaan kebijakan itu sendiri tepat sasaran berdasarkan perencanaan.

Proses komunikasi dalam kebijakan PAUD HI di Kota Bogor didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD HI yakni melalui sosialisasi dan bimbingan teknis. Sosialisasi kebijakan PAUD HI dilakukan oleh pelaksana kebijakan yakni Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor yang kemudian disosialisasikan dan dilaksanakan oleh Lembaga PAUD. Implementasi dapat dikatakan efektif apabila para pembuat kebijakan sudah terlebih dahulu mengetahui dari apa yang akan dikerjakan, mengenai pengetahuan apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan harus ditransmisikan kepada pihak yang tepat. Terdapat tiga indicator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dari variable komunikasi yaitu, transimisi, kejelasan dan konsisten.

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Dalam penyaluran komunikasi sering terjadi masalah seperti halnya salah pengertian atau misskomunikasi, hal ini disebabkan karena banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi ditengah proses penyaluran komunikasi.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan PAUD Holistik Integratif yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang

PAUD Holistik Integratif dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang PAUD Holistik Integratif berkaitan dengan penyaluran komunikasi dapat dilihat dari peran dan fungsi masing-masing instansi. Adapun peran dan fungsi pemerintah daerah adalah melakukan bimbingan teknis dan koordinasi pelaksanaan PAUD Holistik Integratif. Dinas Pendidikan Kota Bogor melakukan bimbingan teknis dan mengkoordinasikan kebijakan PAUD Holistik Integratif kepada seluruh Lembaga PAUD. Lembaga PAUD mensosialisasikan dan mengkoordinasikan ke seluruh warga sekolah.

Hasil wawancara dengan informan 1 yaitu Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, Ibu Euis Rochayati, S.IP., M.Si. beliau mengatakan :

“Kami melakukan kegiatan sosialisasi ya tentunya, pembinaan juga kepada guru, pembinaannya dalam bentuk bimbingan teknis. Untuk kegiatan-kegiatan di Lembaga PAUD kan ada pengawas dan penilik ya, mereka yang bertugas visitasi juga ke setiap sekolah, jadi dengan adanya mereka membuat komunikasi lebih mudah ke setiap sekolah” (Wawancara, Selasa 30 Mei 2023)

Selanjutnya pernyataan mengenai penyaluran komunikasi juga disampaikan oleh informan 2 yaitu Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Supyawan, S.IP., M.Si. beliau mengatakan:

“Peraturan itu mengikuti arahan Pemerintah Pusat dulu, lalu dibuatkan perwali, dari situ perwali disampaikan kepada dinas melalui pertemuan kadis, dari kadis disampaikan kepada bidang PAUD setelah itu kami melakukan sosialisasi dan surat menyurat, sering dibagikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan, pengawas dan penilik juga selalu mengawasi sesuai dengan binaan” (Wawancara, Senin 3 April 2023)

Hal serupa juga dikatakan oleh Informan 3 Staf Analisis Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Hidayat, S.Mn. beliau mengatakan:

“Ada pelatihan atau bimtek tentang PAUD Holistik Integratif. Biasanya kita mendatangkan narasumber khusus untuk menjelaskan kepada peserta yang terdiri dari guru dan kepala satuan PAUD. Pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dalam satuan pendidik, karena dalam satu jenjang pendidikan ada pengawas dan penilik. Jadi kaitannya dengan PAUD HI pasti ada disosialisasikan” (Wawancara, Kamis 30 Maret 2023)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada implemenor kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berwenang dalam mengimplementasikan Kebijakan PAUD Holistik Integratif, maka didapatkan hasil bahwa komunikasi mengenai informasi tentang kebijakan PAUD Holistik Integratif sudah disampaikan melalui kegiatan sosialisasi dengan narasumber yang khusus didatangkan untuk memberikan edukasi terkait kebijakan PAUD Holistik Integratif dan memberikan pembinaan kepada pengelola PAUD yang berupa pembinaan bimbingan teknis.

Selain meminta keterangan dari pihak-pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor, dalam hal ini juga dilakukan wawancara kepada pengelola PAUD yang sudah melaksanakan kebijakan PAUD Holistik Integratif di setiap kecamatan di Kota Bogor mengenai bagaimana sosialisasi yang mereka terima terkait kebijakan PAUD Holistik Integratif, hasil keterangan yang didapatkan dari Kepala Sekolah TK Alyssa, Ibu Wisi Yana, S.Pd adalah :

“Pernah ikut sosialisasi secara online meeting saat covid melanda, narasumbernya dosen dari Univeritas Malang. Materi yang diberikan mengenai 5 komponen PAUD HI yaitu layanan pendidikan, kesehatan, pengasuhan, kesejahteraan dan perlindungan” (Wawancara, Kamis 13 April 2023)

Keterangan di atas didukung oleh pengelola Lembaga PAUD lain, yang menyatakan bahwa :

“Sudah pernah, terakhir mengikuti sosialisasi tahun lalu. Yang disampaikan saat sosialisasi itu terkait bagaimana kenyamanan dan keamanan anak di sekolah, benda-benda apa saja yang harus dihindari dan yang harus tersedia di sekolah” (Roya, S.Pd – Kepala Sekolah TK

Khalifah Bogor 3, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, Selasa 11 April 2023)

“Sosialisasi sudah pernah kami ikuti. Narasumber dari Bunda PAUD Kota Bogor. Untuk materi yang pernah disampaikan terkait kesehatan anak, psikolog anak dan pola makan anak. Misalnya bagaimana cara kita menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus” (Nur Aini, S.Pd – Kepala Sekolah TK Islam Ibnu Hajar, Kecamatan Bogor Timur, Kamis 13 April 2023)

Tanggapan di atas merupakan tiga jawaban dari pengelola PAUD yang sudah melaksanakan kebijakan PAUD Holistik Integratif, yang menyatakan bahwa semua kepala sekolah sudah mengetahui tentang Kebijakan PAUD Holistik Integratif melalui sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Namun, di sisi lain, pengelola PAUD yang belum melaksanakan kebijakan PAUD HI mengaku bahwa tidak pernah ada sosialisasi yang diterima dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, pengakuan tersebut dikatakan oleh Ibu Nanin Suminah, S.Pd selaku Kepala Sekolah RA Ya Bunayya pada kegiatan wawancara, beliau mengatakan :

“Saya tahu kebijakan ini karena pengimbasan dari sekolah lain yang sudah menerima sosialisasi. Jadi, sosialisasi langsung secara mendetail dan terbuka belum pernah ada, informasi mengenai PAUD HI kami menerimanya hasil pengimbasan saja” (Wawancara, Senin 29 Mei 2023)

Hal serupa juga dikatakan oleh dua pengelola PAUD lainnya, yang mengatakan :

“Kebijakan PAUD HI sudah pernah tahu sebelumnya, tapi memang tidak ada sosialisasi, dapat informasi juga dari teman-teman IGRA Kota Bogor saja seperti pengimbasan” (Neneng, S.Pd – Kepala Sekolah RA Al Badriah, Kecamatan Bogor Timur, Kamis 25 Mei 2023)

“Saya mengetahui kebijakan PAUD Holistik Integratif dengan mencari tahu sendiri karena belum pernah ada sosialisasinya, bahkan informasi pengimbasan juga belum ada” (Solihah, S.Pd – Kepala Sekolah KB Al Mustaqim, Kecamatan Bogor Selatan, Selasa 30 Mei 2023)

“Kebijakan PAUD Holistik Integratif saya belum pernah tahu sebelumnya. Belum ada sosialisasi tentang PAUD Holistik Integratif, tidak ada informasi yang sampai kepada kami, bahkan untuk pengimbasan saja tidak ada” (Enah Junaenah, S.Pd – Kepala Sekolah RA Al Juman, Kecamatan Bogor Selatan, Selasa 30 Mei 2023)

Dari hasil wawancara informan di atas, keempatnya sama-sama mengakui bahwa belum pernah menerima sosialisasi secara langsung dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, adapun informasi yang diterima berasal dari informasi pengimbasan dari sekolah yang sudah menerima sosialisasi ataupun inisiatif sendiri mencari tahu secara personal tanpa informasi pengimbasan, bahkan pengakuan lain disebutkan bahwa Kepala Sekolah Al Juman tidak mengetahui perihal kebijakan PAUD Holistik Integratif.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan indikator transmisi, sosialisasi tentang Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh ke pengelola PAUD di seluruh wilayah di Kota Bogor. Masih adanya pengelola PAUD yang belum menerima sosialisasi secara langsung dari Dinas Pendidikan Kota Bogor melainkan hanya berasal dari informasi pengimbasan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap sosialisasi yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait upaya implementasi kebijakan PAUD Holistik Integratif di Kota Bogor belum optimal karena sosialisasi hanya diberikan kepada beberapa sekolah saja sebagai perwakilan dari tiap-tiap kecamatan di Kota Bogor dan sosialisasi tersebut dilakukan secara bergilir. Oleh karena itu, masih adanya sekolah yang belum menerima sosialisasi mengenai kebijakan PAUD HI.

Berdasarkan dokumentasi yang didapat tentang indikator transmisi komunikasi terkait pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik

Integratif (PAUD HI), sosialisasi sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke beberapa Lembaga PAUD.

Gambar 4. 2 Kegiatan Pembinaan PAUD Holistik Integratif



Sumber : Instagram Dinas Pendidikan Kota Bogor

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator transmisi komunikasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif bahwa didapatkan hasil dari pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor telah memberikan sosialisasi kepada pengelola PAUD. Namun, karena tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan terkait peraturan tersebut, mengakibatkan belum terimplementasikannya kebijakan PAUD HI di seluruh Lembaga PAUD di Kota Bogor.

2. Kejelasan

Dalam penyaluran komunikasi terkait kebijakan PAUD HI di Kota Bogor harus dinyatakan secara jelas agar dapat dipahami maksud dan tujuan dari kebijakannya. Kejelasan komunikasi artinya tidak membingungkan dan dapat dimengerti untuk menghindari

kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan.

Berikut wawancara yang dilakukan mengenai kejelasan terkait pelaksanaan kebijakan PAUD HI di Kota Bogor kepada beberapa informan. Informan 1 Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor mengatakan:

“Saya rasa sosialisasi serta pembinaan sudah dilakukan dengan jelas karena yang menyampaikan pun narasumber khusus yang mahir dibidangnya, pengelola Lembaga PAUD juga sudah menerima dengan baik, buktinya sudah banyak sekolah yang mengimplementasikan kebijakan ini, artinya kan paham” (Wawancara, Selasa 30 Mei 2023)

Terkait kejelasan informasi juga didukung oleh pernyataan dari Staf Bidang Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Hidayat, S.Mn menyatakan :

“Informasi sudah bisa disampaikan dengan baik melalui sosialisasi, pelatihan juga. Apa yang telah disampaikan juga bisa diterima dengan baik karena semua sekolah sudah mulai menerapkan kebijakan PAUD HI. Menurut daftar juga sudah banyak sekolah yang menjalankan kebijakan PAUD HI” (Wawancara, Kamis 30 Maret 2023)

Selain meminta keterangan dari Kepala Bidang PAUD dan Dikmas serta Staf Bidang Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, dalam hal ini juga dilakukan wawancara kepada 6 pengelola PAUD yang sudah mengimplementasikan kebijakan PAUD Holistik Integratif di setiap kecamatan di Kota Bogor. Dalam penelitian ini disebut sebagai informan 4,5,6,7,8, dan 9. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengelola PAUD yang sudah mengimplementasikan kebijakan PAUD HI di setiap kecamatan wilayah Kota Bogor bahwasanya mereka sudah menerima informasi mengenai kebijakan PAUD HI dengan baik dan dapat dipahami, pemahaman tersebut juga sudah disampaikan kembali kepada guru-guru di Lembaga PAUD yang dimiliki sehingga kebijakan PAUD HI sudah diimplementasikan.

Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sekolah KB Islamic Kids Corner mengenai kejelasan informasi yang diterima, beliau mengatakan :

“Syukur sudah bisa saya pahami dengan baik karena setelah mengikuti beberapa kegiatan workshop ada ilmu baru yang bisa saya terapkan di IKC. Terkait PAUD HI sudah pernah saya sampaikan kepada guru-guru, mereka sudah memahami karena sudah jadi tugasnya untuk melakukan pemantauan *continue* terkait kebutuhan PAUD HI karena kebutuhan anak-anak tidak hanya berkembang secara fisik saja” (Wawancara, Kamis 6 April 2023)

Hal serupa juga dikatakan oleh pengelola PAUD lainnya mengenai sosialisasi yang diterima sudah jelas dan dapat dipahami.

“Saya memahami kebijakan PAUD Holistik Integratif karena bekerja sama dengan Puskesmas jadi cukup paham. Misalnya dalam pemberian makanan sehat kami yang mengelola, pemahaman mengenai ciri-ciri anak dengan tumbuh kembang yang kurang maksimal, kesehatan gigi dan gusi, pentingnya mencuci tangan, dan lain-lain” (Evi, S.Pd – Kepala Sekolah TK IT Azizah, Kecamatan Bogor Barat, Kamis 6 April 2023)

“Saya pribadi sudah menerima informasi dengan jelas dan saya juga paham, saya memberikan pemahaman juga ke guru-guru. Guru disini juga sudah paham dan sudah melaksanakan kebijakan PAUD Holistik Integratif. Kami juga menginformasikan kepada orang tua mengenai perkembangan anak dan kegiatan di sekolah” (Roya, S.Pd – Kepala Sekolah Khalifah 3, Kecamatan Bogor Utara, Selasa 11 April 2023)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam mencari informasi seputar pelaksanaan kebijakan PAUD HI, menunjukkan bahwa sebagian besar Lembaga PAUD di Kota Bogor sudah memahami kebijakan PAUD Holistik Integratif karena telah melaksanakan kebijakan PAUD Holistik Integratif seperti melakukan pembelajaran dengan metode sentra, melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkaran kepala. Lembaga PAUD juga memberlakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak-anak serta melaksanakan program-program sekolah yang lain untuk meningkatkan kemampuan psikomotorik anak.

Berdasarkan dokumentasi yang didapat mengenai Implementasi Kebijakan PAUD Holistik Integratif, KB Islamic Corner sudah melakukan metode pembelajaran sentra, dengan mengangkat konsep pembelajaran sentra menjadikan proses belajar dilakukan melalui aktivitas main yang didesain untuk menstimulasi perkembangan otak anak. Proses belajar mengajar pun disesuaikan dengan tahap perkembangan tiap anak. Tujuannya, agar hal ini dapat mengembangkan semua titik kecerdasan (*multiple intelligence*) dan keterampilan hidup anak (*essential life skills*).

Gambar 4. 3 Kegiatan Belajar Menggunakan Metode Sentra



Sumber : diolah peneliti, 2023

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator kejelasan komunikasi terhadap pelaksanaan kebijakan PAUD Holistik Integratif, menjelaskan bahwa penyampaian informasi atau komunikasi yang dilakukan baik dari Dinas Pendidikan Kota Bogor selaku pelaksana kebijakan sudah mensosialisasikan kepada pengelola Lembaga PAUD tentang kebijakan PAUD Holistik Integratif sudah dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami. Pemahaman pengelola PAUD juga ditandai dengan mereka

menyampaikan informasi yang didapatkan dalam sosialisasi kepada guru-guru di Lembaga PAUD-nya. Kemudian, guru menyampaikan kepada orang tua dan menerapkan programnya kepada peserta didik.

3. Konsistensi

Konsistensi dalam komunikasi perlu diperhatikan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pelaksana kebijakan. Tidak adanya pengurangan maupun penambahan dalam peraturan pelaksanaan kebijakan menandakan bahwa kebijakan tersebut memiliki konsistensi dalam proses komunikasinya.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, Ibu Euis Rochayati, S.IP., M.Si mengatakan bahwa :

“Komunikasi yang dibangun saya rasa sudah konsisten berdasarkan perpres dan perwali kota nya saja tidak ada yang diubah-ubah, apa yang sudah tertulis ya kami jalankan.” (Wawancara, Selasa 30 Mei 2023)

Menurut informan berikutnya yaitu Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, mengungkapkan bahwa :

“Pelaksanaan kebijakan PAUD Holistik Integratif kami berpedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota bogor, yaitu Perpres nomor 60, Perwal nomor 11 dan Dokumen juknis. Sejauh ini tidak ada perubahan dari peraturan yang ada jadi kami tinggal melaksanakannya sesuai peraturan saja.” (Wawancara, Senin 3 April 2023)

Selain meminta keterangan dari Kepala Bidang PAUD dan Dikmas serta Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, dalam hal ini juga dilakukan wawancara kepada Pengelola PAUD yang sudah mengimplementasikan PAUD HI di enam kecamatan se-Kota Bogor. Dalam penelitian ini disebut sebagai informan 4,5,6,7,8 dan 9. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada

seluruh pengelola PAUD yang sudah berstatus PAUD Holistik Integratif bahwasanya kebijakan ini sudah dilaksanakan sejak awal sampai saat ini tidak ada perubahan mulai dari peraturan pemerintah sampai dengan petunjuk teknisnya. Hal-hal yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor juga tidak pernah adanya penambahan atau perubahan atas apa saja yang telah disampaikan pada kegiatan sosialisasi yang telah diselenggarakan. Kalau pun ada perubahan pasti akan diinformasikan oleh Dinas, tapi sejauh ini tidak pernah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada sekolah-sekolah mengenai indikator konsistensi ini bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif, Dinas Pendidikan Kota Bogor tidak pernah memberikan informasi tambahan lain atas penambahan atau perubahan terkait kebijakan PAUD HI. Pelaksanaan kebijakan PAUD HI dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022 serta macam-macam materi yang pernah disampaikan pada sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator konsistensi untuk melaksanakan Kebijakan PAUD Holistik Integratif, Dinas Pendidikan Kota Bogor dinilai sudah konsisten dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan tersebut yang ditandai dengan tidak adanya perubahan atas peraturan yang telah berlaku, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan pada pengelola PAUD selaku pelaksana kebijakan.

4.2.2 Sumber Daya

Dalam teori implementasi Edwards III faktor sumber daya yang baik meliputi staf dengan ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup serta relevan mengenai cara untuk melaksanakan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang terlibat dalam

implementasi termasuk dengan fasilitas yang ada. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif (Roring , Mantiri, & Lopian, 2021). Sumber daya kebijakan sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, tanpa sumber-sumber kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas mungkin hanya akan menjadi sebuah rencana saja tanpa ada realisasinya (Winarno, 2016). Terdapat empat indikator yang dapat mengukur keberhasilan dari variable sumber daya yaitu, staf, fasilitas, informasi dan wewenang.

1. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan suatu kebijakan kerap kali disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang mencukupi, memadai dan tidak berkompeten pada bidangnya. Kuantitas staf atau pelaksana kebijakan belum cukup menyelesaikan persoalan dalam implementasi kebijakan, tetapi diperlukan kualitas serta dukungan dari sumber daya yang ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan 1 yaitu Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor mengatakan :

“Kegiatan di bidang PAUD banyak sekali, jadi dirasa SDM disini masih dirasa kurang ya tapi kita cover-cover saja pekerjaannya, untuk kasi sesuai dengan jobdescnya, kalau staf dan temen-temen pekerja yang lain itu yang menyebar membantu. Pengawas dan penilik juga kan asalnya dari disdik, penilik ada 5, pengawas ada 17, nah mereka bekerja untuk mengawasi dan membina seluruh TK/Sederajat di Kota Bogor makanya saya rasa kurang, secara pemahaman pengawas pasti paham karena mereka kan yang turun langsung ke lapangan” (Wawancara, 30 Mei 2023)

Hal serupa juga dikatakan oleh informan 2, yaitu Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor mengatakan :

“Kami sebenarnya kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), kekurangan personil, makanya dirangkap terus. Kuantitas kurang namun kami maksimalkan dengan kondisi yang ada, kami ingin menambah personil, tapi dari atas belum ada lowongan, jadi untuk saat ini SDM yang ada digabungkan tugas pokok dan fungsinya. Tapi untuk kebijakan PAUD HI, pegawai disini sebagian besar tahu dan paham terutama pengawasnya karena kan mereka yang membina” (Wawancara, Senin 3 April 2023)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa staf atau pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai pelaksana kebijakan dari kebijakan PAUD Holistik Integratif belum mencukupi sehingga mengakibatkan tugas pokok dan fungsi para pegawai menjadi tumpang tindih. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan PAUD Holistik Integratif harus dapat memahami terkait tugas dan fungsinya agar tidak terjadi kekeliruan, berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah memiliki pemahaman terkait kebijakan PAUD Holistik Integratif.

Selain meminta keterangan dari pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor, dalam hal ini juga dilakukan wawancara dengan pengelola PAUD berstatus PAUD Holistik Integratif, beberapa diantaranya mengatakan :

““Iya memang ada pengawas yang visitasi 1 kali dalam 6 bulan, melakukan pengecekan sekolah terkait laporan-laporan, mereka datang biasanya sendiri saja.” (Wisi Yana, S.Pd - Kepala Sekolah TK Alyssa, Kamis 13 April 2023)

“Pengawas ada, tapi kesini gak sering, gak ada jadwal pasti juga karena mungkin laporan kami sebatas kurikulum saja yang sudah diunggah ke dapodik kan ya, karena kan kami tidak menerima BOP juga, biasanya sendirian saja” (Nur Aini, S.Pd – Kepala Sekolah TK Ibnu Hajar, Kamis 13 April 2023)

“Penyampaian ke sekolah itu jarang banget, pengawas sesuka hati aja kapan datangnya tanpa jadwal pasti, biasanya 1 orang saja yang memang biasanya dia yang bertugas ke sekolah kami” (Susi Hartati, S.Pd – Kepala Sekolah TK Nurul Huda, Kamis 13 April 2023)

Berdasarkan keterangan di atas bahwasanya pengawas yang bertugas untuk melakukan kunjungan ke tiap-tiap sekolah hanya datang seorang diri saja tanpa ditemani oleh partner kerja lainnya. Sedikitnya

pengawas yang berkunjung ke sekolah-sekolah diakibatkan oleh jumlah staf pada bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Bogor yang sedikit

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, jumlah staf yang ada di tempat masih minim, dengan minimnya sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bogor juga mengakibatkan keterbatasan akses dalam melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada pengelola PAUD di Kota Bogor, sehingga masih adanya sekolah yang belum menerima sosialisasi secara langsung dari Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dikaitkan dengan Teori Implementasi Edwards III melalui indikator staf terhadap pelaksanaan kebijakan PAUD Holistik Integratif didapatkan hasil bahwasanya staf Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor selaku pelaku kebijakan masih belum mencukupi untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada Bidang PAUD terutama untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan PAUD Holistik Integratif.

2. Informasi

Informasi merupakan suatu media penting yang menghubungkan pengetahuan tentang cara melaksanakan. Informasi dalam implementasi kebijakan mempunyai dua bentuk yaitu informasi mengenai kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian informasi mengenai aturan atau tata cara pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 dan juga didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif, dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan PAUD Holistik Integratif.

Berkenaan dengan informasi PAUD Holistik Integratif, informan 1 dalam hal ini Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor mengatakan bahwa :

“Untuk semua pegawai di bidang PAUD sudah paham karena kan kami pasti menjelaskan setiap kebijakan atau program yang perlu dijalankan di bidang kami. Kalau untuk penyaluran informasi kan sudah dilakukan pembinaan dan sosialisasi kepada perwakilan pengelola PAUD, tetapi memang sebenarnya kami melakukan sosialisasi untuk PAUD HI itu 1 kali dalam sebulan, artinya kan sosialisasi kami lakukan secara berkala, tapi terkadang disesuaikan dengan kebutuhan, kami sosialisasi memang tidak semua sekolah di undang karena TK/ sederajat jumlahnya sangat banyak, sementara anggaran terbatas, jadi kami ambil perwakilan-perwakilan saja. Dalam 1 kali sosialisasi perwakilan 5 sekolah/kecamatan, untuk sekolah lain menerima informasi pengimbasan saja yang dibina selanjutnya oleh pengawas secara berjenjang” (Wawancara, Selasa 30 Mei 2023)

Hal serupa juga dikatakan oleh informan 2, yaitu Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, mengatakan :

“SDM sudah paham mengenai PAUD Holistik Integratif karena sudah disosialisasikan secara garis besarnya, baik itu pengawas, penilik, staf, dan pengelola-pengelola PAUD yang ada di wilayah Kota Bogor. Jadi kalau kami, mengacu pada perpres dan perwal dan dokumen juknis. Sama seperti PAUD juga acuannya ketiga dokumen itu. Nah untuk Sosialisasi dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan tentang PAUD HI, secara bersamaan juga update informasi tentang hasil evaluasi yang memang selalu *dimonitoring*, dari hasil evaluasi tersebut kami mengetahui bahwa dalam pelaksanaan PAUD HI apakah hasilnya masih ada yang kurang atau hasilnya meningkat dan atau mungkin ada satuan PAUD yang belum bekerja sama dengan pihak lain” (Wawancara, Senin 3 April 2023)

Selain meminta keterangan pelaksana kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, juga dikakukan penggalian informasi kepada pengelola PAUD yang berstatus PAUD Holistik Integratif, diantaranya mengungkapkan :

“Sosialisasi hanya awal-awal saja itu satu kali, karena memang secara bergilir, gak selalu kebagian undangan. Tapi biasanya ada yang melakukan kunjungan, awalnya rutin, tapi makin kesini tidak begitu rutin kecuali ketika ada pertemuan-pertemuan dengan kepala sekolah TK di Kota Bogor. Iya kalau untuk aturan pelaksanaan kami diberikan

dokumen-dokumen, tapi sebetulnya untuk penyelenggaraan kami tuh udah melaksanakan kegiatan yang mirip PAUD HI sebelum ada kebijakannya. Kalau untuk penyampaian informasi ke orang tua, biasanya ada pertemuan orang tua di awal tahun sekalian pemberitahuan tata tertib sekolah dan saat pembagian rapor. Kita sisipkan. Kita memang belum ada program tersendiri untuk orang tua” (Wisi Yana, S.Pd – Kepala Sekolah TK Alyssa, Kamis 13 April 2023)

“Penyampaian sosialisasi itu saya hanya mengikuti sekali saja karena memang system sosialisasi dilakukan secara bergilir dari tiap tiap kecamatan, seperti bulan lalu saya dapat informasi dari TK sebelah kalau dia baru saja mendapat undangan sosialisasi PAUD HI. Kami memberikan informasi kepada orang tua melalui kelas parenting tiap 3 bulan kepada orang tua, kita mendatangkan narasumber dari luar biasanya psikolog anak, bahkan ada guru tamu juga kami datangkan. Untuk tata aturannya sebenarnya menyesuaikan yang sudah berjalan sih ya, tapi memang dinas ngasih dokumen, setelah dibaca saya ngerasa kalo kegiatan ini sebenarnya udah dilakuin di sekolah kami” (Susi Hartati, S.Pd – Kepala Sekolah TK Nurul Huda, Kamis 13 April 2023)

“Informasi yang didapatkan setelah pandemic covid melalui online, Dinas Pendidikan kan mengundang Lembaga PAUD karena ini sistem bergilir, kalau sudah pernah ikut sosialisasi nanti bergantian dengan PAUD lain karena gak mungkin sekaligus. Komunikasi yang dilakukan dengan orang tua melalui buku penghubung dan forum *parenting* agar orang tua dan sekolah memiliki pandangan yang sama dalam mendidik putra-putrinya. Kami diberikan dokumen dan ppt materi yang selesai dipaparkan untuk jadi petunjuk pelaksanaan, setelah itu tinggal disesuaikan dengan kegiatan sekolah kami” (Rofidah, S.Pd – Kepala Sekolah KB Islamic Kids Corner, Kamis 6 April 2023)

Adapun keterangan yang didapatkan dari pengelola PAUD yang belum menerapkan kebijakan PAUD Holistik Integratif, dalam penelitian ini disebut sebagai informan 10,11,12,13,14 dan 15. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada enam pengelola PAUD berstatus non Holistik Integratif bahwasanya penyaluran informasi tentang Kebijakan PAUD Holistik Integratif yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor hanya berupa himbuan saja tanpa mewajibkan seluruh sekolah mengimplementasikan kebijakan ini. Meskipun sebagian besar informan mengakui bahwa kedepannya kebijakan ini akan diimplementasikan oleh seluruh Lembaga PAUD se-Kota Bogor secara bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dalam menggali informasi mengenai pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif di Kota Bogor, didapatkan hasil bahwasanya penyaluran informasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor melalui pemberian dokumen peraturan yang dipergunakan oleh pihak pengelola Satuan PAUD dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Bogor belum menyebarkan informasi secara berkala dan berkesinambungan, atas dasar pengakuan dari informan hal tersebut diakibatkan oleh jumlah Lembaga PAUD di Kota Bogor yang sangat banyak dan keterbatasan anggaran serta sumber daya manusianya.

Di sisi lain, penyampaian informasi juga dilakukan oleh pengelola satuan PAUD kepada orang tua peserta didik, didapatkan hasil bahwa sebagian besar orang tua murid telah mengetahui tentang adanya penerapan Kebijakan PAUD Holistik Integratif melalui penyampaian informasi dari kegiatan pertemuan orang tua yang dilaksanakan oleh pihak pengelola PAUD.

Selain penyampaian informasi kepada orang tua murid, pihak pengelola PAUD juga memberikan informasi mengenai pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif melalui banner-banner informasi seperti yang telah didokumentasikan oleh peneliti sebagai berikut :

Gambar 4. 4 Banner Informasi



Sumber : diolah peneliti, 2023

Dengan menggunakan teknik triangulasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Implementasi Kebijakan milik Edwards III indikator informasi terhadap pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif bahwa didapatkan hasil dari pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor belum menyalurkan informasi secara berkala dan berkesinambungan sehingga kebijakan PAUD HI dinilai hanya sekedar himbauan saja terutama bagi Lembaga PAUD yang belum mengimplementasikan PAUD Holistik Integratif, hal tersebut menjadi kelemahan Dinas Pendidikan Kota Bogor yang mengakibatkan masih ada Lembaga PAUD yang belum mengimplementasikan kebijakan ini dengan alasan kurangnya motivasi yang diberikan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Selain itu, untuk indikator kepatuhan pelaksanaan suatu kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif setiap pengelola satuan PAUD mengacu pada dokumen juknis dan materi yang telah disampaikan saat sosialisasi kemudian untuk melaksanakan kegiatannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.

3. Wewenang

Pada umumnya perintah untuk dilaksanakan berupa suatu legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 disebutkan bahwa “Dinas yang membidangi Pendidikan meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1, meliputi: (a) pembinaan PAUD; (b) penyediaan layanan PAUD dan peningkatan kualitas pembelajaran; (c) penyediaan layanan pendidikan keluarga; (d) peningkatan kompetensi guru; dan (e) pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas.

Keputusan yang tertulis pada peraturan di atas merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan selaku pelaksana kebijakan PAUD Holistik Integratif di Kota Bogor yang kemudian ditanggapi langsung oleh Ibu Euis Rochayati, S.IP., M.Si selaku Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Bogor, yang mengatakan :

“Wewenang kami antara lain melakukan pembinaan kepada pengelola PAUD/Sederajat melalui pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis. Kami juga melakukan peningkatan kualitas pembelajaran dengan memberikan BOP dan fasilitas berupa APE sih paling. Peningkatan kompetensi guru serta tenaga kependidikannya dengan melalui pemberian beasiswa untuk bersekolah lagi, diklat jenjang dasar, lanjutan, dan mahir. Ada 60 guru PAUD di perguruan tinggi yang kami dibiayai. Untuk layanan pendidikan keluarga itu kami tidak melakukannya, melainkan sekolah yang secara langsung memberikan kepada orang tua murid” (Wawancara, Selasa 30 Mei 2023)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor menyatakan :

“Kami memberikan wewenang atas dasar aturan yang tertera dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 yang diberikan secara berjenjang dari pejabat tertinggi di Dinas Pendidikan yakni Kadis, lalu ke kabid, lalu ke bawahan lain, setelah itu kami melakukan pengawasan, *monitoring*, edukasi, dukungan, evaluasi dan penyediaan sarana prasarana ke sekolah-sekolah” (Wawancara, Senin 3 April 2023)

Beberapa informan selaku pengelola PAUD Holistik Integratif menjelaskan terkait wewenang yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan PAUD Holistik Integratif di sekolah mereka, diantaranya memaparkan :

“Selain apa yang tertulis pada peraturan dan penyampaian dari dinas, kami dibebaskan untuk pelaksanaan kebijakannya secara teknis, maka wewenang kami dengan memberikan 5 layanan PAUD HI dengan pembelajaran sistem sentra yang terbagi menjadi 6 bagian (sentra balok, sentra persiapan, sentra main peran, sentra sains dan bahan alam, sentra seni dan kreativitas, dan sentra ibadah), adapun memberikan pembelajaran calistung melalui permainan. Jadi sensorik anak lebih terangsang dan itu memang lebih bagus secara tidak langsung anak-anak *have fun* di sekolah. Selain itu, kami mengadakan layanan psikolog untuk kesiapan anak ke jenjang berikutnya, menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan anak (umum dan gigi) dan mengadakan kelas *parenting* bagi orang tua. Kita juga pernah membuatkan KIA dan membantu anak yang belum memiliki akta kelahiran serta memastikan perlengkapan belajar yang digunakan aman digunakan” (Evi, S.Pd – Kepala Sekolah TK IT Azizah, Kamis 6 April 2023)

“Iya kalo Dinas Pendidikan sih enak ngasih kita kebebasan untuk penyelenggaraan PAUD HI karena kan memang kondisi setiap sekolah beda, gak bisa disamaratakan jadi kalau wewenang kami sebagai pengelola PAUD melakukan pengukuran tb/bb/lk secara rutin per-3 bulan sekali, pemberian multivitamin dan vaksin yang dibantu oleh Puskesmas, melakukan kunjungan ke rumah masing-masing anak untuk lebih tahu perilaku di rumah seperti apa, 1 bulan sekali ada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dijadwalkan secara bergantian antara pihak sekolah dan orang tua. Untuk system pembelajaran di kelas TK A biasanya hanya pengenalan huruf saja melalui lagu-lagu, kalau kelas TK B selain dari permainan juga lebih banyak kegiatan yang levelnya sudah cukup rumit. Disini juga kan ada kegiatan tambahan, 2 diantaranya eskul wajib karena sudah disisipkan ke dalam jam belajar (Bahasa Inggris dan mengaji), sisanya tergantung masing- masing anak bersedia atau tidak” (Wisi Yana, S.Pd – Kepala Sekolah TK Alyssa, Kamis 13 April 2023)

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bogor menjalankan hak dan kekuasaan untuk bertindak sebagai pelaksana kebijakan dengan memberikan pembinaan PAUD, memberikan beasiswa, diklat, serta bimbingan teknis kepada guru PAUD sebagai bentuk peningkatan kompetensi guru, memberikan bantuan

berupa BOP dan pemberian APE sebagai bentuk peningkatan layanan pendidikan, perihal layanan pendidikan keluarga dilimpahkan kepada pihak pengelola sekolah. Di sisi lain, sekolah juga sudah menjalankan hak dan kekuasaan untuk bertindak sebagai pelaksana kebijakan di sekolah dengan memberlakukan metode pembelajaran sentra, melakukan pengukuran tb/bb/lk kepada anak, perbantuan pembuatan KIA dan pemberian edukasi kepada orang tua murid.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat melihat kegiatan yang ada di berbagai sekolah penyelenggara PAUD Holistik Integratif, terlihat bahwa program yang dijalankan sekolah terkait kebijakan PAUD HI dilakukan atas aturan yang berlaku tetapi banyak improvisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola PAUD karena hal tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh sekolah dalam aspek kondisi anak-anak, orang tua dan anggaran.

Berdasarkan hasil dokumentasi, peraturan yang mengatur mengenai wewenang yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam menyelenggarakan kebijakan PAUD Holistik Integratif ialah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Di Kota Bogor.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa wewenang yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bogor bersifat top-down yang artinya menggunakan keputusan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dan kemudian dikomunikasikan kepada pengelola dengan memberikan keleluasaan wewenang secara penuh kepada pengelola PAUD dalam pelaksanaan secara teknis kebijakan PAUD Holistik Integratif, yang terpenting adalah sekolah dapat mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan mutu dan kualitas.

1. Fasilitas

Fasilitas merupakan sebuah unsur penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Implementor mungkin saja mempunyai staf yang kompeten dibidangnya, tetapi tanpa didukung fasilitas (sarana dan prasarana) yang baik maka akan menghambat pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Pengadaan fasilitas yang baik dalam mendukung tujuan kebijakan akan berdampak baik pula pada keberhasilan mencapai tujuan kebijakan. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor yang mengatakan bahwa :

“Fasilitas yang kami berikan kan sebenarnya hanya saat pembinaan PAUD, seperti tempat yang yang nyaman karena biasanya acara dilaksanakan di hotel dengan narasumber yang didatangkan secara khusus expert di bidangnya, kalau lagi ada pelatihan-pelatihan juga sama. Selain itu juga kita memberikan APE ke sekolah tapi itu juga terbatas, tidak semua sekolah dapat karena kita menyesuaikan sekolah yang memang memerlukan dan anggaran” (Wawancara, Selasa 30 Mei 2023)

Berikutnya Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor mengatakan bahwa :

“Untuk fasilitas khususnya sarana dan prasarana masih banyak yang kurang karena memang untuk pemberian fasilitas tidak setahun secara bersamaan, tapi bergiliran, misal setahun ada jatah untuk 3 TK/SPS bisa dilaksanakan sesuai anggaran yang diprogramkan. Sesuai dengan kemampuan APBD” (Wawancara, Senin 3 April 2023)

Keterangan lain juga didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengelola Lembaga PAUD, dalam penelitian ini disebut sebagai informan 4,5,6,7,8 dan 9. Didapatkan hasil dari pertanyaan terkait fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah pengelola PAUD yang sudah menjalankan kebijakan PAUD Holistik Integratif tidak menerima fasilitas dalam bentuk lain selain pelatihan dan Bantuan Operasional Prosedur (BOP). Bahkan untuk

APE sebagai alat penunjang pembelajaran juga tidak pernah mendapatkannya.

Di sisi lain, pengelola PAUD berstatus PAUD Holistik Integratif sebagai pelaksana kebijakan di lingkup sekolah menjelaskan fasilitas yang dimiliki dengan penjelasan sebagai berikut :

“Fasilitas untuk kelangsungan kegiatan pembelajaran disini sudah tersedia dan mencukupi, tempat belajar disini juga sudah full AC, tersedia ruang bermain indoor dan outdoor lengkap dengan alat bermain serta perpustakaan mini, karena kita ada *daycare* maka kita ada fasilitas ruang tidurnya. Fasilitas pendukung juga sudah tercukupi dengan baik. Kami ada website, brosur, laporan orang tua per 3 bulan, laporan kegiatan anak-anak via grup, layanan konsultasi psikologi anak, layanan kesehatan umum dan gigi, layanan catering untuk *daycare* dan fasilitas anak dari aspek kognitif dan motorik sudah tersedia yang disertakan Alat Permainan Edukatif (APE) per-sentra (sentra balok, sentra persiapan, sentra main peran, sentra sains dan bahan alam, sentra seni dan keretivitas, dan sentra ibadah)” (Rofidah, S.Pd – Kepala Sekolah KB Islamic Kids Corner, Kamis 6 April 2023)

“Sudah sangat mencukupi, tiap kelas juga dilengkapi dengan Alat Permainan Edukatif (APE) yang sangat banyak dan variatif supaya anak senang belajar sambil bermain. Bahkan kita juga ada fasilitas kolam renang berisi air dan berisi pasir untuk pelaksanaan sentra bahan alam. Untuk banner-banner informasi dan tempat cuci tangan tersedia di depan kelas, alat ukur tinggi badan dan timbangan berat badan kami ada di setiap kelasnya, pengukur suhu tubuh juga kami ada” (Evi, S.Pd – Kepala Sekolah TK IT Azizah, Kamis 6 April 2023)

“Sudah tersedia semuanya, mulai dari kamar tidur dan kamar mandi untuk anak-anak *daycare* karena mereka pulang sudah dalam keadaan bersih, kelas juga nyaman dengan AC, permainan diluar kelas juga banyak. sudah ada pastinya mulai dari alat ukur tinggi badan, berat badan dan alat ukur lingkar kepala karena itu rutin selalu kami lakukan 1 bulan sekali jadi wajib punya” (Roya, S.Pd – Kepala Sekolah Khalifah 3, Kecamatan Bogor Utara, Selasa 11 April 2023)

Gambar 4. 5 Fasilitas di Satuan PAUD Holistik Integratif



Sumber : diolah peneliti, 2023

Ketiga keterangan dari hasil wawancara dengan dukungan dokumentasi di atas menjelaskan bahwa pengelola PAUD telah menyediakan sarana sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dari kebijakan PAUD Holistik Integratif. Selain itu pengelola PAUD juga menyediakan prasarana yang merupakan hal penunjang utama dalam proses pelaksanaan kebijakan PAUD Holistik Integratif, hal tersebut dilakukan sebagai usaha pengelola PAUD dalam pengimplementasian kebijakan PAUD Holistik Integratif secara optimal.

Adapun keterangan lain yang diungkapkan oleh pengelola PAUD yang belum menjalankan kebijakan PAUD Holistik Integratif terkait fasilitas yang didapat dari Dinas Pendidikan Kota Bogor dan yang mereka miliki :

“Kami kan belum menjalankan kebijakan PAUD HI yaitu karena disini untuk kegiatan anak-anak sejujurnya masih kurang, seperti yang saya katakan tadi bahwa kami tidak memiliki lahan terbuka jadi untuk

aktivitas anak-anak diluar ruangan tidak ada, hanya memanfaatkan aula saja. Kalau disini kan mayoritas penduduk asli yang orang tuanya juga keterbatasan pendidikan dan ekonomi jadi mereka tidak paham mengenai apa saja yang sudah kami sampaikan padahal kita juga berusaha sudah memberikan penjelasan tapi dukungan belum penuh. Kami juga belum siap kalau memang mau melaksanakannya. Kalo dukungan lain dari dinas paling peningkatan kompetensi guru dan bantuan operasional saja, tidak ada coaching khususnya” (Fatimah, S.Pd – Kepala Sekolah TK Daarul Khoir, Selasa 23 Mei 2023)

“Fasilitas belum mencukupi, masih ada yang kurang, belum punya UKS, toilet hanya 1 saja, tidak punya mushola khusus, tidak punya lapangan untuk anak-anak berkativitas diluar ruangan. Bahkan untuk system pembelajaran saja kita sharing bahan belajarnya karena APE nya hanya 1 kotak masing-masing sentra, kita usahakan alat main itu bergantian dan disesuaikan dengan jadwal masing-masing kelas. Hal ini juga menjadi hambatan kami untuk mengimplementasikan kebijakan PAUD Holistik Integratif, yang saya lihat juga tidak ada bantuan lain selain bantuan keuangan BOP ya untuk mensupport sekolah agar menjadi PAUD HI” (Neneng, S.Pd – Kepala Sekolah RA Al Badriah, Kamis 25 Mei 2023)

“Fasilitas untuk berkegiatan di luar kelas kami hanya menggunakan aula tanpa lahan terbuka bebas karena memang keterbatasan lahan karena disini perkampungan padat penduduk. Kemudian karena kita melihat latar belakang orang tua, sasaran disini memang ekonomi menengah ke bawah, namanya juga sekolah di perkampungan walaupun adanya di kota tapi kampung terpencil. Kurangnya pemahaman, pendidikan, dan ekonomi orang tua yang membuat kedepan agak harus di push lagi. Parenting juga kami hanya 1 semester sekali, keinginan kami memanggil psikolog tapi biaya untuk itu tidak ada, hal administrasi juga kesulitan karena kami tidak ada tenaga Tata Usaha. Terkait kendala ini pemerintah hanya baru membantu dari BOP saja” (Solihah, S.Pd – Kepala Sekolah KB Al Mustaqim, Selasa 30 Mei 2023)

Gambar 4. 6 Fasilitas di Satuan PAUD non Holistik Integratif



Sumber : diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas menjelaskan bahwa fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD non Holistik Integratif dirasa masih kurang dalam segi fasilitas fisik berupa dukungan orang tua serta fasilitas berupa sarana dan prasarana. Pasalnya, untuk pelaksanaan kegiatan di luar sekolah masih terdapat keterbatasan berupa lahan yang mengakibatkan segala aktivitas dilakukan di dalam ruangan. Selain itu tidak ada dukungan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor selain Bantuan Operasional Prosedur, menurut pengakuan informan di atas, keterbatasan fasilitas inilah yang menjadi alasan kendala pengelola PAUD untuk mengimplementasikan Kebijakan PAUD Holistik Integratif di sekolahnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Lembaga PAUD yang berstatus PAUD Holistik Integratif bahwa fasilitas fisik dalam implementasi kebijakan ini terdiri dari pengelola dan guru-guru PAUD yang bertugas memberikan pengajaran kepada peserta didik dan membantu proses stimulasi psikomotorik anak. Fasilitas berupa sarana dan prasarana terdiri dari ruang kelas yang memadai dan nyaman, alat ukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, Alat Permainan Edukatif (APE), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), ruang tidur, pojok literasi, banner informasi dan tempat cuci tangan. Akan tetapi, hasil observasi di Lembaga PAUD yang belum mengimplementasikan PAUD Holistik Integratif bahwa fasilitas fisik berupa dukungan orang tua belum dirasakan secara penuh karena keterbatasan pengetahuan dan ekonomi orang tua murid, selain itu untuk fasilitas berupa sarana dan prasarana juga belum semuanya terpenuhi seperti tidak tersedianya lahan terbuka untuk kegiatan anak, APE yang digunakan dengan sistem bergilir karena keterbatasan alat, tidak tersedianya UKS, toilet antara putra/I serta guru masih digabung.

Dengan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edwards

III indikator fasilitas dalam pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif di Kota Bogor didapatkan hasil bahwa fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam upaya mendukung pelaksanaan Kebijakan PAUD HI masih kurang maksimal terutama kepada Lembaga PAUD yang terkendala mengimplementasikan Kebijakan PAUD HI, tidak ada upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk mendukung Lembaga PAUD tersebut agar bertransformasi menjadi Holistik Integratif selain memberikan Bantuan Operasional Prosedur. Meskipun begitu, Lembaga PAUD sebagai pelaksana kebijakan yang bertugas menerapkan kepada anak-anak memberikan usaha terbaik mereka dalam penyediaan fasilitas yang maksimal dalam penunjang kegiatan di sekolah untuk terselenggaranya kebijakan PAUD Holistik Integratif.

4.2.3 Disposisi

Implementasi suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik dipengaruhi oleh sikap dari semua pihak yang ikut melaksanakan kebijakan. Sikap disiplin dan tanggung jawab diperlukan bagi implementor sebagai dedikasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Implementor dalam melaksanakan kebijakan PAUD Holistik Integratif agar lebih efektif maka harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi ini akan muncul diantara pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tapi juga dirinya. Mereka tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahaminya (Setyawan & Srihardjono, 2016). Adapun hal penting yang harus dicermati pada variabel disposisi terdapat dua indikator yakni sikap pelaksana dan insentif :

1. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas administrasi terkait kebijakan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang mempunyai dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan terkhusus pada kepentingan masyarakat. Apabila pengangkatan personil dalam pelaksanaan kebijakan adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang kebijakan yang dibuat maka akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sehingga berhasil atau tidaknya suatu kebijakan tergantung pada siapa yang menjalankan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor yaitu Ibu Euis Rochayati S.IP., M.Si menyatakan :

“Penempatan posisinya disesuaikan dengan jurusan saja sih sebenarnya, kalau yang PNS kan memang ada surat tugasnya dan menjabat sebagai apa itu sudah diatur dari atas. Pegawai disini juga ada beberapa yang sudah S2 linier dan sedang studi juga. Pegawai disini juga rata-rata lulusan dengan jurusan linier. Kalau untuk kebijakan PAUD HI petugas penyelenggaranya itu ditugaskan atas dasar tugas dari atasan langsung.” (Wawancara, Selasa 30 Mei 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Supyawan, S.IP., M.Si. yang mengatakan :

“Mayoritas penempatannya sudah sesuai, jikalau tidak pun akan diberitahu. Sejauh ini dengan berbagai macam disiplin ilmu, kalau sudah masuk ke bidang PAUD harus memahami tentang tupoksinya, buat petugas PAUD HI tanggung jawabnya diberikan oleh atasan langsung sesuai bidangnya” (Wawancara, Senin 3 April 2023)

Selain meminta keterangan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor, juga dilakukan wawancara kepada pengelola PAUD pada seluruh kecamatan di Kota Bogor, dalam penelitian ini disebut sebagai informan 4,5,6,7,8 dan 9. Dari hasil wawancara yang dilakukan mendapatkan hasil bahwasanya terkait sikap pelaksana, pengelola PAUD merasa petugas atau pengawas yang melakukan penyampaian informasi dinilai dapat memahami kebijakan yang disampaikan karena dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pengelola PAUD.

Di sisi lain, pengelola PAUD selaku pelaksana kebijakan memiliki kewenangan dalam menentukan guru yang berhak mengajar pada sekolah yang dikelola berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya. Hal tersebut dilakukan agar guru dapat mengimplementasikan kebijakan PAUD Holistik Integratif dengan baik kepada anak-anak. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan beberapa pengelola PAUD diantaranya mengatakan :

“Guru yang bertanggung jawab mengajar kelas B adalah guru yang bisa mempersiapkan anak masuk ke SD, jadi saya carinya yang sudah kesiapan mereka mendidik anak ke jenjang berikutnya. Kalau TK A justru saya yang mengajar karena anak usia dini harus dapat penanganan yang lebih professional karena hal itu menjadi sebuah pondasi mereka berkembang secara berkelanjutan. Guru-guru pengetahuannya sangat ok udah sesuai dengan kompetensinya karena kan mereka berpengalaman mengajar lama, guru-guru disini 3 orang lulusan S1 PAUD, 1 guru lagi akan melanjutkan kuliah. Pihak dinas sudah ok dalam memberikan informasi tentang apa saja, apalagi saya suka nanya-nanya sama Pak Supyawan tuh ya, pasti dijawab sama beliau” (Wisi Yana, S.Pd – Kepala Sekolah TK Alyssa, Kamis 13 April 2023)

“Setiap penerimaan guru baru ada tes (tes tulis, praktek, micro teaching, mengaji), percobaan mengajar 3 bulan jadi saya sudah tahu kapasitas mereka ditempatkan dikelas mana, walaupun tiap tahun kami suka ada rolling kelas. Sudah. Karena semua guru yang mengajar disini lulusan S1 PG PAUD. Untuk menangani anak-anak sudah paham karena linear juga. Kalau untuk pelaksanaan kebijakan ini sih sikapnya mereka sama aja, iya pasti mereka paham dari dulu juga setiap kali kasih informasi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan pasti bisa jawab”

(Roya, S.Pd – Kepala Sekolah Khalifah 3, Kecamatan Bogor Utara, Selasa 11 April 2023)

“Saya pasang standar kalau pengajar untuk TPA atau *daycare* itu yang terpenting perform bagus, sayang anak, murah senyum, mudah akrab dengan anak, kalau ilmu akan saya bimbing dan minimal juga sudah pernah menjadi guru PAUD sebelumnya. Tapi kalau untuk TK dan KB kita cari yang berpengalaman, walaupun tidak kelulusan S1 minimal ada pengalaman pernah mengajar sebagai guru PAUD sebelumnya. Penempatan guru TK dan KB kami bergantian secara bergilir. Kalau orang Dinas sih saya yakin sudah sesuai ya, gak mungkin lah orang yang gak kompeten diberikan tugas untuk pelaksanaan kebijakan karena saya merasa mereka sudah paham juga dengan apa yang disampaikan.” (Rofidah, S.Pd – Kepala Sekolah KB Islamic Kids Corner, Kamis 6 April 2023)

Berdasarkan keterangan informan-informan di atas menghasilkan keterangan terkait indikator sikap pelaksana bahwasanya Dinas Pendidikan Kota Bogor telah memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya dengan mendelegasikan kebijakan ini kepada seluruh pegawai di bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Bogor, hal tersebut juga didukung berdasarkan keterangan dari pihak pengelola PAUD yang menilai bahwa pihak petugas dari Dinas Pendidikan Kota Bogor telah memahami kebijakan ini karena selalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan yang disampaikan. Di sisi lain, pengelola PAUD sebagai pelaku kebijakan juga telah melaksanakan tugasnya untuk menjaring tenaga pendidik di sekolahnya yang berkompeten.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat berada di kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, pegawai yang dijadikan informan dapat mengetahui dan dapat memberi penjelasan mengenai kebijakan PAUD Holistik Integratif. Hasil observasi yang dilakukan pada sekolah-sekolah juga menghasilkan sikap pelaksana yang berkompeten dalam mengimplementasikan kebijakan PAUD Holistik Integratif kepada peserta didiknya.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator sikap pelaksana dalam pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif didapat hasil bahwa pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor maupun pihak pengelola PAUD sudah memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

2. Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan agar pelaksana kebijakan dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik. Pada umumnya, orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah biaya keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor yaitu Ibu Euis Rochayati S.IP., M.Si menyatakan :

“Untuk insentif pegawai diluar gaji utama ya kami ada. Untuk pengelola PAUD juga Tidak ada surplus ada dana tambahan sih untuk pelaksanaan kegiatan ini, perlakuan kami kepada sekolah yang sudah berstatus HI dengan yang belum pun sama saja, tidak ada anggaran tambahan. Paling kita memberikan tambahan gaji kepada guru yang sudah bersertifikasi sebesar Rp. 300.000, itu sih paling, bukan ke sekolahnya” (Wawancara, Selasa 30 Mei 2023)

Pernyataan didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Staf Analis Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Hidayat, S.Mn menyatakan :

“Kalau dari segi keuangan kita diberikan tunjangan secara rutin. Untuk pengelola PAUD setahu saya tidak ada anggaran tambahan, semua sesuai rancangan APBD saja, karena dirasa anggaran cukup karena setiap Lembaga PAUD kan menerima anggaran dari orang tua dan BOP juga

ada untuk mengembangkan PAUD Holistik Integratif” (Wawancara, Kamis 30 Maret 2023)

Selain meminta keterangan dari Kepala Bidang PAUD dan Dikmas dan Staf Analisis Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, dalam hal ini juga dilakukan wawancara kepada beberapa sekolah yang sudah mengimplementasikan PAUD HI, diantaranya mengatakan :

“Tidak ada sumber dana tambahan lain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, kami mandiri dari uang SPP dan sedikit BOP yang dialokasikan untuk fasilitas” (Rofidah, S.Pd – Kepala Sekolah KB Islamic Kids Corner, Kamis 6 April 2023)

“Pemasukan yang kita dapatkan asalnya dari SPP dan BOP saja, kami selalu berusaha mencukupkan untuk segala kebutuhan, karena kalau kurang bingung juga mau minta ke siapa, karena Dinas tidak memberikan anggaran tambahan bagi kami yang sudah mengimplementasikan kebijakan PAUD HI padahal sebenarnya itu perlu ya, makanya guru disini tidak mendapatkan insentif juga dari sekolah karena kami kesulitan membagi anggaran untuk kebutuhan anak-anak di sekolah. Paling ada gaji tambahan untuk guru bersertifikasi” (Susi Hartati, S.Pd – Kepala Sekolah TK Nurul Huda, Kamis 13 April 2023)

“Sejauh ini support dari pemerintah hanya dalam bentuk pelatihan-pelatihan saja untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dan BOP sih, tidak ada surplus apapun” (Roya, S.Pd – Kepala Sekolah Khalifah 3, Kecamatan Bogor Utara, Selasa 11 April 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh pengelola Lembaga PAUD di enam kecamatan di Kota Bogor yang belum mengimplementasikan PAUD Holistik Integratif, dalam penelitian ini disebut sebagai informan 10,11,12,13,14 dan 15. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada keenam pengelola sekolah, bahwasanya Dinas Pendidikan Kota Bogor tidak memberikan stimulus tambahan kepada mereka selaku pelaku kebijakan PAUD Holistik Integratif selain BOP, padahal mereka membutuhkannya sebagai anggaran tambahan sekaligus motivasi agar pengelola memiliki semangat lebih untuk mengimplementasikan kebijakan ini.

Berdasarkan keterangan dari informan diatas mengenai indikator insentif dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Dinas Pendidikan Kota Bogor tidak memberikan stimulus apa-apa bagi para pelaksana di lapangan karena memang tidak ada anggaran untuk hal itu. Melainkan, Dinas Pendidikan Kota Bogor hanya memberikan Dana Bantuan Operasional Prosedur (BOP) kepada seluruh sekolah PAUD di Kota Bogor dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di sekolah, termasuk pelaksanaan kebijakan PAUD Holistik Integratif di masing-masing sekolah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat mengunjungi di satuan Lembaga PAUD yang sudah berstatus PAUD Holistik Integratif serta yang belum berstatus PAUD Holistik Integratif, bahwa indikator insentif dalam hal ini ialah Dinas Pendidikan Kota Bogor tidak memberikan insentif bagi para pengelola PAUD selaku pelaksana kebijakan. Meskipun begitu, sebagian besar sekolah selalu berusaha memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk pelaksanaan kegiatan dan program sekolah termasuk pelaksanaan kebijakan PAUD Holistik Integratif

Berdasarkan hasil dokumentasi, dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 pada bagian lampiran pendanaan indikatif pada Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2020 - 2024 tidak ditemukan pendanaan lain untuk PAUD selain pendanaan BOP bagi sekolah.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator insentif dalam pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif didapatkan hasil dari pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor tidak memberikan stimulus apapun bagi para pelaksana kebijakan di lapangan, dalam hal ini pelaksana di lapangan adalah pengelola PAUD karena memang tidak ada pendanaannya. Dengan tidak diberikannya insentif

kepada pengelola PAUD menjadikan hal ini menjadi salah satu alasan utama bagi para pengelola PAUD non Holistik Integratif untuk tidak mengimplementasikan kebijakan PAUD Holistik Integratif, karena pada dasarnya insentif ini digunakan untuk memotivasi para pengelola PAUD agar lebih gencar dalam melaksanakan kebijakan PAUD Holistik Integratif, tetapi para pengelola PAUD non HI merasa kurang termotivasi, salah satu alasannya diakibatkan oleh tidak diberikannya dana tambahan selain dana BOP.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan aparatur pemerintah yang berperan penting dalam melaksanakan setiap kebijakan pemerintah. Birokrasi sebagai sebuah pelaksana kebijakan publik harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi dengan baik. Kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat kerjasama semua pihak yang berperan. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Dalam variable ini terbagi menjadi 2 indikator yaitu, *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi.

1. *Standard Operating Procedures* (SOP)

SOP merupakan sebuah kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa informan mengenai SOP dalam pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif. Informan 1 dalam hal ini Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor mengatakan bahwa :

“SOP penyelenggara PAUD HI pada tingkat pemerintah daerah kota sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, tapi selain itu juga kami berpedoman pada NPSK petunjuk teknis yang diberikan oleh Dirjen PAUD untuk detailing. SOP sudah kami jalankan kok” (Wawancara, Selasa 30 Mei 2023)

Keterangan lain diungkapkan oleh Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Supyawan, S.IP., M.Si yang mengatakan :

“SOP sudah ada mulai dari pelaksanaan, cara kerja, membuat perizinan ataupun proses pembelajaran di TK. Semua ada SOP nya. Saya melihat bahwa pelaksanaan sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang ada” (Wawancara, Senin 3 April 2023)

Berdasarkan dokumentasi yang dilakukan dengan pencarian fakta melalui dokumen, dihasilkan bahwa SOP penyelenggaraan PAUD HI di pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 yang mengamanatkan : “Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk; (a) melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini; (b) melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan; (c) melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini; (d) melakukan advokasi; (e) memberikan pelatihan kepada penyelenggara atau tenaga pelayanan; (f) melakukan evaluasi dan pelaporan.

Selain meminta keterangan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor, juga dilakukan wawancara kepada pengelola PAUD pada seluruh kecamatan di Kota Bogor, dalam penelitian ini disebut sebagai informan 4,5,6,7,8 dan 9. Dari hasil wawancara yang dilakukan mendapatkan hasil bahwasanya terkait SOP yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah diterima oleh pihak pengelola PAUD. Namun, ketika melakukan wawancara kepada pengelola PAUD non HI yang dalam penelitian ini disebut sebagai informan 10,11,12,13,14 dan 15 mendapatkan hasil bahwasanya terkait SOP yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor mereka belum sepenuhnya menerima kegiatan yang seharusnya dijalankan sesuai SOP, seperti pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis.

Terkait indikator *Standard Operating Procedures* (SOP), satuan Lembaga PAUD selaku pelaksana kebijakan juga memerlukan SOP dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang ada di sekolahnya, wawancara pun dilakukan kepada Lembaga PAUD berstatus Holistik Integratif, diantaranya menyatakan :

“Sebenarnya kan kalau sekolah kami itu dari sebelum ada kebijakan PAUD HI sudah menjalankan program-program yang sekarang ini dibilangnya PAUD HI gitu, makanya untuk SOP khusus PAUD HI kami tidak ada karena setiap kegiatan PAUD HI sudah tercakup pada SOP kegiatan sekolah” (Roya, S.Pd – Kepala Sekolah Khalifah 3, Kecamatan Bogor Utara, Selasa 11 April 2023)

“SOP program-program sekolah saja paling, karena kalau SOP PAUD HI secara khusus memang belum ada, tapi itu sudah tercover dari SOP program sekolah kita yang sudah terakreditasi PAUD HI” (Evi, S.Pd – Kepala Sekolah TK IT Azizah, Kamis 6 April 2023)

“Kalau SOP PAUD HI belum ada, hanya ada SOP program sekolah saja karena pelaksanaannya pun sama saja” (Wisi Yana, S.Pd – Kepala Sekolah TK Alyssa, Kamis 13 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar Lembaga PAUD belum memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) khusus dalam melaksanakan kebijakan PAUD Holistik Integratif dikarenakan SOP yang dimiliki sekolah saat ini sudah meng-cover kegiatan dalam program kebijakan PAUD Holistik Integratif.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam menggali informasi mengenai pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif di Kota Bogor mendapatkan hasil bahwa sebenarnya dalam penyusunan program kerja dan Standar Operasional Porsedur (SOP) dapat disesuaikan pada rencana program yang telah disusun oleh masing-masing satuan PAUD sesuai dengan kondisinya untuk memudahkan penerapan PAUD HI di satuan PAUD. SOP disusun oleh guru dan kepala sekolah/pengelola dengan format penyusunan SOP diserahkan kepada Satuan PAUD masing-masing.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif di Kota Bogor didapatkan hasil bahwa pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor melakukan penyelenggaraan kebijakan PAUD Holistik Integratif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Bogor. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan kebijakan PAUD Holistik Integratif di satuan PAUD dilaksanakan atas dasar SOP yang dimiliki sekolah secara pribadi yang disesuaikan dengan rencana program kegiatan di sekolah, artinya kewenangan dalam hal SOP dilimpahkan secara penuh kepada masing-masing satuan PAUD.

2. Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja (Edward, 2012:154). Upaya penyebaran-penyebaran tanggungjawab kegiatan terkait pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif dijalankan dengan berkoordinasi antar instansi melalui informasi yang didapat dari Dinas Pendidikan dengan menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsi yang sudah ditentukan oleh peraturan, serta mendukung agar tujuan PAUD Holistik Integratif yakni terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia dengan terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, yang mengatakan :

“Penyebaran tanggung jawabnya semua sudah ada strukturalnya, sudah ada pembagian juga dari atasan. Dalam pelaksanaannya juga kan diintervensi tidak hanya pendidikan saja, layanan kesehatan dengan pemberian vitamin, imunisasi, obat cacing, pin polio. Jadi kita bekerja sama juga dengan dinas-dinas terkait, paling komunikasi dengan stakeholder dari OPD lain karena terhalang jadwal yang selalu bentrok karena kegiatan kami juga padat” (Wawancara, Selasa 30 Mei 2023)

Wawancara pun dilakukan kepada Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Bogor, mengatakan :

“Penyebaran tanggung jawabnya semuanya sudah berstruktur. Penyebaran tugas bagi pengawas misalnya, pengawas ada 17, ya itu tugasnya dibagi ke beberapa wilayah kecamatan di kota bogor. Terus juga kan ada gugus tugas, nah itu bentuk penyebaran tugasnya sudah jelas juga, ketika kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain pasti ada kendala. Biasanya ada keterlambatan informasi yang menjadi kendala, bentrok kegiatan antar stakeholder menjadikan setiap rapat kurang maksimal”. (Wawancara, Senin 3 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam penyebaran tanggung jawab pelaksana Kebijakan PAUD Holistik Integratif sudah dilaksanakan, adapun kebijakan ini diintervensi dengan berbagai stakeholder namun saja dalam koordinasi yang dibentuk ada hambatan yang dirasakan seperti keterlambatan informasi dan pertemuan-pertemuan yang berbenturan dengan jadwal masing-masing sehingga hasil rapat kurang maksimal.

Di sisi lain, pihak pengelola satuan PAUD selaku penyelenggara kebijakan PAUD Holsitik juga mengaku bahwa sudah melaksanakan penyebaran tanggung jawab di sekolahnya, hal tersebut diakui oleh beberapa pengelola satuan PAUD yang diantaranya mengatakan :

“Sudah dilakukan secara efektif karena masing-masing tingkatan kelas ada penanggung jawabnya. Selain penyebaran tanggung jawab di kelas juga kami ada penjadwalan piket dan pengawasan bersama untuk mengetahui pada hari itu ada problem dimana. Kami bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan layanan kesehatan anak dan

pastinya orang tua selaku pemberi support” (Rofidah, S.Pd – Kepala Sekolah KB Islamic Kids Corner, Kamis 6 April 2023)

Kita ada pembagian tugas, seperti guru piket misalnya. Kita kan sistemnya juga sentra, maka kalau pagi itu ada *circle time* (penggabungan seluruh kelas) dan itu ada penanggung jawabnya untuk menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan, penjaga tamu serta absen kedatangan anak-anak. Itu sudah terkoordinasi untuk pembagian tanggung jawabnya. Kami sudah pasti melibatkan dinas pendidikan karena kita kan dibawah naungan mereka, lembaga PAUD lain untuk bertukar informasi, puskesmas untuk kebutuhan fasilitas cek kesehatan umum dan dokter gigi untuk pengecekan gigi anak-anak” (Evi, S.Pd – Kepala Sekolah TK IT Azizah, Kamis 6 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sebagian besar pengelola satuan PAUD sudah menjalankan penyebaran tanggung jawab di sekolahnya dengan memberikan tanggung jawab kepada guru-guru. Selain itu, sekolah juga melakukan kerja sama dengan stakeholder lain (puskesmas) dalam penyelenggaraan pengecekan kesehatan peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terlihat bahwa kurangnya koordinasi antar instansi yakni stakeholder dan Dinas Pendidikan Kota Bogor. Hal tersebut karena kesibukan yang dimiliki masing-masing instansi sehingga komunikasi belum berjalan dengan maksimal. Selain itu, kerja sama antar pihak yang dilakukan oleh pihak Pengelola satuan PAUD sebagian besar sekolah hanya bekerja sama dengan Puskesmas saja, belum memanfaatkan kehadiran stakeholder lain untuk penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di sekolahnya.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara dan observasi dikaitkan dengan Teori Edwards III indikator fragmentasi dalam pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif bahwa didapatkan hasil pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah menjalankan penyebaran tanggung jawab bagi pegawainya berdasarkan tugas dari pejabat tingkat atas, selain itu juga Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah menjalin kolaborasi dan koordinasi

dengan stakeholder lain namun dalam pelaksanaannya masih terjadi hambatan dalam hal komunikasi karena kesibukan masing-masing. Pihak pengelola satuan PAUD juga sudah melakukan penyebaran tanggung jawab dan bekerja sama dengan pihak lain yakni Puskesmas. Kerja sama yang dibangun oleh pengelola satuan PAUD kebanyakan hanya dengan puskesmas, hal ini membuktikan bahwa kerja sama yang dilakukan masih terbatas, padahal Dinas Pendidikan Kota Bogor memberi keleluasaan kepada setiap satuan PAUD untuk melakukan kemitraan dengan pihak manapun.